

BAB I

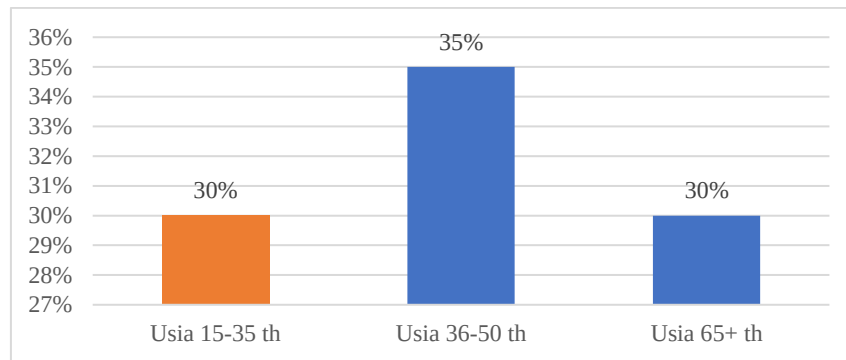
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu literasi keuangan telah menjadi perhatian global karena berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi individu dan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2024). Berbagai studi menunjukkan bahwa literasi keuangan masih rendah secara global (Khairunnisah et al., 2024; Andriyani et al., 2024; Ariani et al., 2024). Berdasarkan laporan hasil survei *S&P Global FinLit* 2025, angka literasi keuangan secara global itu masih di angka 33%. Terutama di kalangan perempuan, kelompok usia muda dan tua, serta individu dengan pendidikan rendah (Lusardi & Mitchell, 2014). Adapun proporsi presentase literasi keuangan ini di dominasi oleh laki-laki 35% dan perempuan 30%.

Rendahnya literasi keuangan berdampak luas pada stabilitas sosial-ekonomi (Akbulaev, 2022). Individu dengan literasi rendah cenderung membuat keputusan finansial keliru, seperti berutang melebihi kemampuan atau terjebak investasi ilegal (Huston, 2010). Sebaliknya, literasi keuangan yang baik berhubungan positif dengan perilaku finansial sehat dan kesejahteraan jangka panjang (Fernandes et al., 2014). Minimnya literasi ini menjadi akar berbagai persoalan seperti kemiskinan, keterbatasan akses perbankan, dan ketimpangan kesejahteraan. Karena itu, peningkatan literasi diakui sebagai strategi penting untuk mencapai SDG 1, SDG 4, dan SDG 8 (UNDP, 2022), sekaligus fondasi membangun masyarakat inklusif, tangguh, dan berdaya saing (Akbulaev, 2022).

Sejalan dengan pentingnya literasi keuangan dalam konteks global tersebut, pemahaman mengenai tingkat literasi keuangan berdasarkan kelompok usia menjadi aspek yang perlu diperhatikan (Lusardi et al., 2009). Selain itu, berikut adalah presentase indeks literasi keuangan dari segi usia seperti pada tabel berikut:



Gambar 1. 1

Indeks Literasi Keuangan Global Berdasarkan Usia

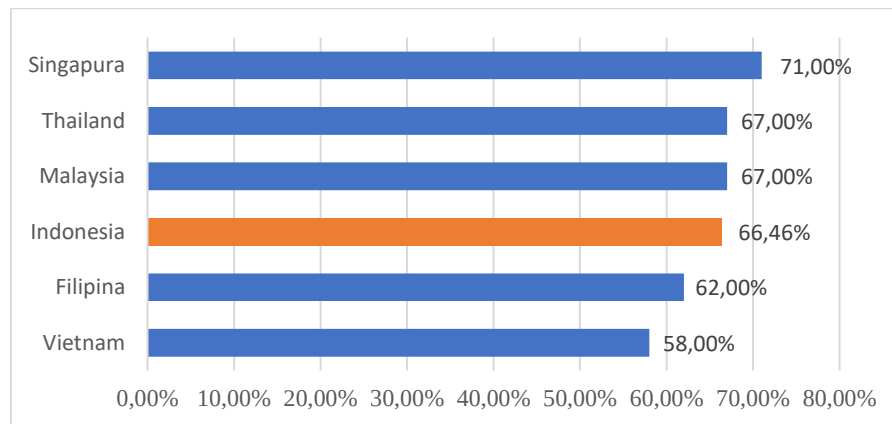
Sumber: Survei FinLit Global S&P (2025)

Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan global tidak merata di setiap kelompok usia (S&P Global FinLit Survey, 2025). Kelompok dewasa paruh baya (36–50 tahun) mencatat tingkat literasi keuangan tertinggi, yaitu sebesar 35% (S&P Global FinLit Survey, 2025). Hal ini dapat diartikan bahwa pada usia tersebut, individu berada dalam masa produktif dan aktif secara ekonomi seperti bekerja, mengelola penghasilan, membayar utang, dan membuat keputusan keuangan jangka panjang sehingga memiliki pengalaman dan pemahaman keuangan yang lebih baik (Lusardi & Mitchell, 2014).

Sementara itu, Kelompok dewasa muda (15–35 tahun) dan lansia (65+ tahun) memiliki tingkat literasi keuangan rendah, masing-masing hanya 30% (S&P Global FinLit Survey, 2025). Pada usia muda, hal ini dipengaruhi oleh minimnya pengalaman mengelola keuangan *pribadi* dan terbatasnya penerapan pengetahuan finansial sehari-hari (OECD/INFE, 2023), sementara kedekatan dengan teknologi dan akses informasi luas tidak otomatis meningkatkan pemahaman konsep keuangan dasar (Jerrim et al., 2022). Pada lansia, rendahnya literasi dipicu oleh kurangnya pembaruan informasi produk dan layanan keuangan modern, serta kemungkinan penurunan fungsi kognitif yang memengaruhi pengambilan keputusan (Lusardi & Tufano, 2015). Secara umum, rendahnya literasi keuangan dapat menyebabkan kesalahan dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang bijak (Chen & Volpe, 1998).

Hal ini juga sejalan dengan Indeks literasi keuangan Indonesia pada 2025 tercatat 66,46%, masih lebih rendah dibanding Malaysia dan Thailand yang masing-masing 67,00%, serta terpaut cukup jauh dari Singapura yang mencapai

71,00% (OJK, 2025; *Asia-Pacific Financial Literacy Index*, 2025). Data ini menunjukkan posisi literasi Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga.

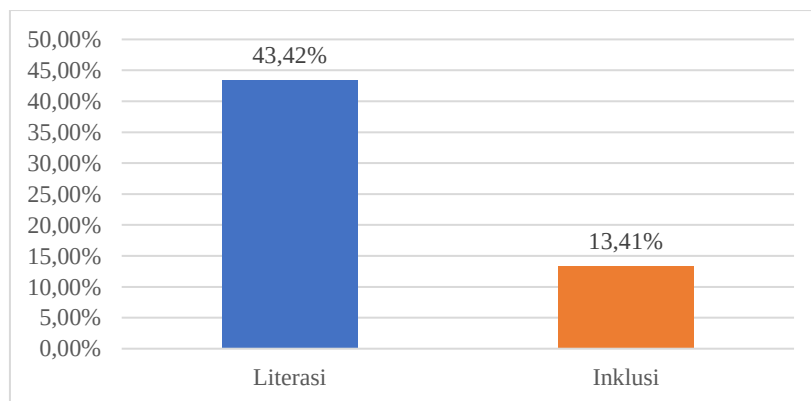


Gambar 1. 2

Indeks Literasi Keuangan Asia Tenggara

Sumber: Asia-Pacific Financial Literacy Index (2025)

Rendahnya indeks literasi keuangan ini juga, tidak terjadi hanya secara umum akan tetapi terjadi juga pada indeks literasi keuangan syariah nasional meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih cenderung rendah (OJK, 2025). Seperti berdasarkan data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang dilakukan oleh OJK, bahwa indeks literasi keuangan syariah berada pada persentase 43,42%, dan inklusi keuangan syariah adalah sebesar 13,41%. Angka ini masih tergolong rendah (Zikri et al., 2024).



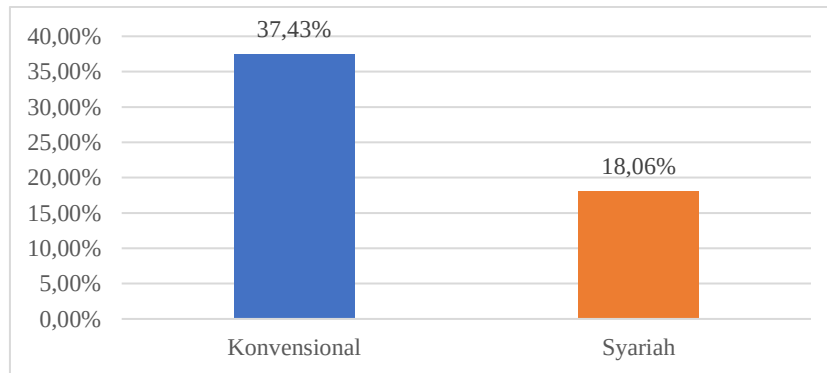
Gambar 1. 3

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Nasional

Sumber: OJK (2025)

Meskipun literasi keuangan syariah menjadi perhatian dalam skala nasional, data menunjukkan bahwa kesenjangan yang signifikan juga terjadi di tingkat regional. Di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan

populasi Muslim terbesar di Indonesia namun, tingkat literasi keuangan syariah hanya mencapai 18,06%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 37,43% (OJK, 2025). Hal ini, mencerminkan paradoks antara dominasi identitas keislaman dan pemahaman terhadap keuangan syariah yang masih minim.

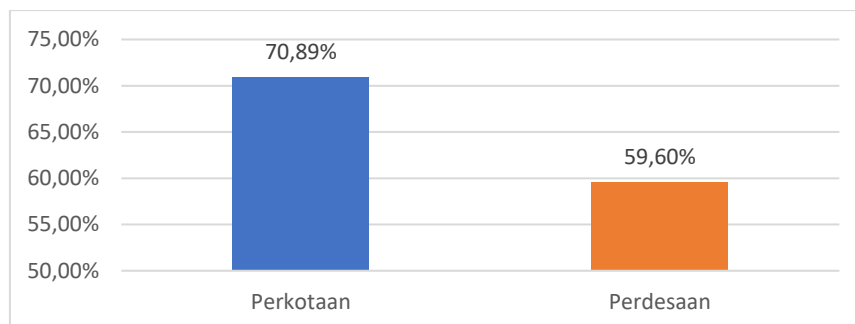


Gambar 1. 4

Indeks Literasi Keuangan Provinsi Jawa Barat

Sumber: OJK (2025)

Fenomena ini juga dapat diamati berdasarkan perbedaan wilayah, di mana tingkat literasi keuangan masyarakat di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan (Azeez & Banu, 2021).



Gambar 1. 5

Indeks Literasi Keuangan Menurut Klasifikasi Desa

Sumber: OJK (2025)

Di Indonesia, literasi keuangan masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah pedesaan dengan akses terbatas terhadap informasi dan edukasi finansial (Hidayah et al., 2023). Rendahnya literasi ini berdampak pada keputusan keuangan yang kurang optimal, termasuk investasi di pasar modal syariah, sehingga peningkatannya menjadi prioritas untuk memperluas partisipasi masyarakat (Rahmadewi et al., 2024). Faktor penyebabnya meliputi minimnya akses edukasi, keterbatasan informasi, dan pola ekonomi tradisional yang tidak

berorientasi jangka panjang (OJK, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi, terutama di pedesaan, bukan hanya masalah pengetahuan, tetapi juga memengaruhi perilaku dan keputusan finansial sehari-hari (Do & Pham, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan sering kali berujung pada pengambilan keputusan utang yang buruk, seperti meminjam lebih dari kemampuan membayar atau memilih pinjaman dengan bunga tinggi (Muflikhati, 2023). Di Indonesia, masalah utang konsumtif terus meningkat, terutama di kalangan generasi milenial. Kemudahan akses terhadap kredit, seperti kartu kredit dan pinjaman daring, menjadi salah satu penyebab tingginya utang konsumtif (Ginting & Redzuan, 2021). Tanpa literasi keuangan yang memadai, banyak individu terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi (Molchan, 2023).

Dalam konteks keuangan syariah, hal ini menjadi semakin penting karena pinjaman daring umumnya mengandung unsur *riba* yang secara tegas dilarang dalam Islam (Yusof & Sabri, 2017). Ketika literasi keuangan syariah meningkat, seseorang tidak hanya memahami aspek teknis keuangan, tetapi juga memiliki kesadaran religius untuk menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan eksploitasi (Yusof & Sabri, 2017). Santri atau masyarakat yang *well literate* dalam keuangan syariah akan mampu mengenali produk keuangan mana yang halal dan mana yang haram, serta akan cenderung menghindari pinjaman daring berbunga sebagai bentuk konsistensi terhadap nilai-nilai Islam (Nawi et al, 2018).

Sebaliknya, ketika literasi keuangan syariah rendah, individu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan antara pinjaman halal dan pinjaman berbunga yang dilarang (Frederica, Sari, & Rizki, 2023). Akibatnya, mereka rentan tertipu oleh iklan promosi pinjaman daring yang menjanjikan pencairan cepat tanpa memahami implikasi akad yang tidak sesuai syariah, bunga tersembunyi, maupun potensi penagihan yang tidak manusiawi (Muflikhati & Lestari, 2023). Rendahnya literasi keuangan syariah juga menyebabkan lemahnya kontrol diri terhadap dorongan konsumtif, sehingga utang daring justru dijadikan solusi instan untuk kebutuhan jangka pendek tanpa pertimbangan nilai-nilai

keuangan Islami (Muflikhati & Lestari, 2023). Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan syariah menjadi langkah strategis tidak hanya untuk melindungi individu dari jeratan pinjaman daring berbunga, tetapi juga untuk membentuk perilaku keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam (Frederica et al., 2023).



Gambar 1. 6

Provinsi dengan Nilai Utang Pinjaman daring Terbesar Nasional

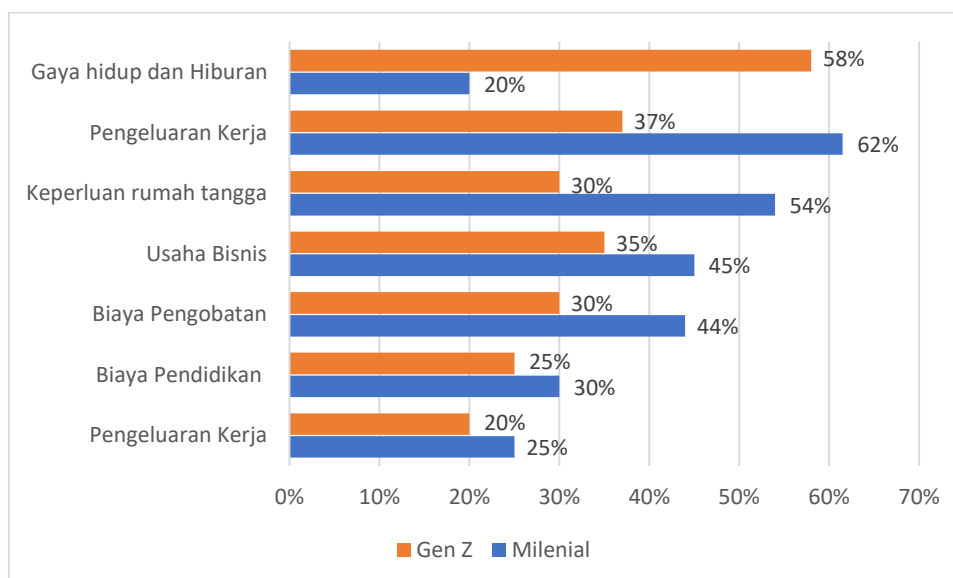
Sumber: OJK (2024)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh entitas peminjam tersebut memiliki utang pokok yang masih berjalan atau belum dibayar (*outstanding loan*) pinjaman daring nasional mencapai Rp74,48 triliun, rekor tertinggi sejak awal tahun 2024 (OJK, 2024). Pada September 2024 Jawa Barat menjadi provinsi dengan utang pinjaman daring terbesar, yaitu Rp19,38 triliun atau setara 26% dari total nilai utang pinjaman daring nasional (OJK, 2024). Jika ditinjau berdasarkan kelompok usia peminjamnya, penerima kredit daring didominasi oleh 19-34 tahun. Kelompok usia yang termasuk kategori pelajar atau mahasiswa serta pekerja ini memiliki nilai akumulasi utang pinjaman daring sebesar Rp27,1 triliun, setara 54,06% dari total utang pinjaman daring nasional. OJK juga mencatat, kelompok usia tersebut secara konsisten jadi penyumbang utang daring terbesar sepanjang tahun ini (OJK, 2024).

Oleh karena itu, peran literasi keuangan tidak bisa diabaikan dalam memahami adopsi pinjaman daring yang meluas (Hidayat & Pertiwi, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kemudahan pinjaman daring menjadi daya tarik utama, kurangnya literasi keuangan di kalangan peminjam potensial dapat menyebabkan perilaku meminjam yang berisiko dan ketergantungan pada praktik pinjaman ilegal (Solihati, Rizki, & Sari, 2023). Pentingnya edukasi

keuangan yang lebih baik menjadi krusial untuk memastikan konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat terkait opsi pinjaman mereka dan menghindari risiko yang terkait dengan pemberi pinjaman yang tidak teregulasi (Frederica et al., 2023).

Setiap orang memiliki alasan tersendiri dalam mengambil pinjaman daring, seperti yang diungkap survei *IDNTimes Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025*. Survei ini dilakukan terhadap 750 responden Generasi Z (Gen Z) yang berusia 12 hingga 27 tahun dan 750 responden Generasi Milenial yang berusia 28 hingga 43 tahun pada Maret-Agustus 2024. Hasil survei tersebut menyatakan sebanyak 58% Gen Z mengambil pinjaman daring untuk memenuhi gaya hidup dan hiburan. Sedangkan, mayoritas Milenial (54%) justru melakukan pinjaman daring untuk keperluan rumah tangga.



Gambar 1. 7

Penggunaan Pinjaman Daring Generasi Z dan Milenial

Sumber: *IDNTimes (2025)*

Generasi Milenial lebih banyak memanfaatkan pinjaman daring untuk kebutuhan praktis seperti modal usaha (45%), biaya pengobatan (44%), pendidikan (30%), dan keperluan kerja (25%). Alasan serupa juga ditemui pada Gen Z, namun frekuensinya lebih dominan pada Milenial. Sebagian besar Milenial (88%) telah menikah dan memiliki anak, sehingga kebutuhan mereka lebih berorientasi pada tanggung jawab keluarga. Hal ini terlihat dari rendahnya

persentase Milenial yang berutang untuk gaya hidup dan hiburan, yaitu hanya 20%.

Beberapa waktu lalu juga media sosial diramaikan dengan kabar ratusan santri menjadi korban penipuan modus baru dengan iming-iming keuntungan 10% dan berujung berutang pinjaman daring. Kini, mereka terjatut utang dengan total tagihan ditaksir miliaran rupiah. Sebagian dari mereka bahkan diteror oleh penagih utang, atau *debt collector* (Kompas, 2022).

Hal ini sangat relevan bagi pengguna pinjaman daring, karena kurangnya literasi keuangan dapat menyebabkan ketergantungan pada pinjaman berbasis bunga, yang bertentangan dengan ajaran Islam (Hidayat & Pertiwi, 2025). Jelas sebagai muslim mengetahui bahwa *riba* ataupun bunga sangat dilarang dalam agama Islam (Aulia & Fasa, 2021). Larangan *riba* tersebut sebenarnya sudah jelas di terangkan dalam Al Quran surat ali'Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

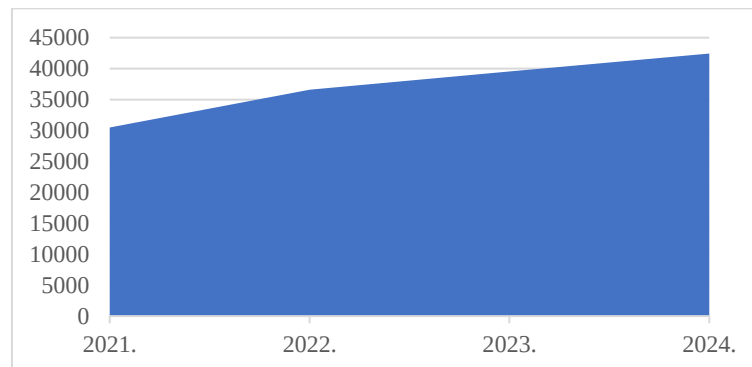
Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Riba dianggap sebagai praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak (Nuri, 2024). Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung bersikap konsumtif dalam menggunakan layanan pinjaman daring, bahwa perilaku konsumtif dapat memicu penggunaan pinjaman daring yang tidak bijak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah keuangan yang lebih besar (Machfiroh & Usman 2023). Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak konsumtif masyarakat dalam penggunaan pinjaman daring terhadap keuangan *pribadi*, diperlukan upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan di masyarakat (Hidayat & Pertiwi, 2025).

Salah satu komponen dari unit masyarakat tersebut adalah pondok pesantren (Hidayah et al., 2023). Pada periode 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat terdapat jumlah pondok pesantren yang sudah berizin di

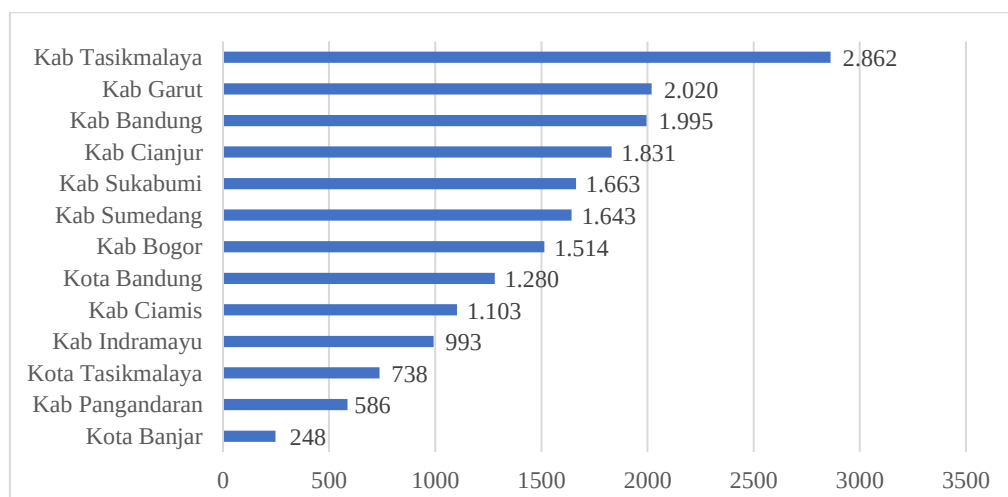
Indonesia sebanyak 42.435 lembaga dengan total sekitar 4,9 juta santri (Kemenag, 2024).



Gambar 1. 8
Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia

Sumber: Kemenag (2024)

Dengan adanya 4,9 juta santri, pesantren berperan penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan sosial dan ekonomi di masyarakat (Mediawati, 2023). Selain itu, Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah pondok pesantren terbanyak, yaitu 12.121 lembaga dan menduduki presentase 30,70% dari total pondok pesantren nasional (Kemenag, 2024). Dominasi jumlah pondok pesantren di Jawa Barat tahun 2024 berada di Wilayah Priangan Timur, dengan Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyumbang tertinggi, yaitu sebanyak 2.862 lembaga (Kemenag, 2024).



Gambar 1. 9
Jumlah Pondok Pesantren di Jawa Barat

Sumber: Kemenag (2024)

Banyaknya pondok pesantren di wilayah ini menunjukkan kekayaan tradisi Islam sekaligus peran pentingnya dalam pendidikan agama. Julukan “Kota Santri” yang disematkan pada Tasikmalaya pun masih bertahan hingga kini (Amaliyah et al., 2023). Selain itu, Tasikmalaya juga dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif yang melibatkan santri dalam berbagai usaha untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Saputra, 2024). Peningkatan jumlah pesantren tersebut menandakan perkembangan positif bagi pendidikan agama di Indonesia. Namun, di balik potensi besar itu, literasi dan inklusi keuangan syariah santri masih rendah, sehingga menjadi tantangan serius dalam penguatan ekonomi syariah nasional (Rohim et al., 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan santri di berbagai pondok pesantren masih tergolong rendah (Andrean & Ratnawati, 2022). Data dari tiga lokasi memperkuat temuan ini. Di Pondok Pesantren Ngalah, Pasuruan, tingkat literasi keuangan syariah santri tercatat di bawah 50%, mencerminkan pemahaman yang minim terhadap konsep dasar keuangan syariah (Farida, 2022). Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, indeks literasi keuangan syariah santri hanya mencapai 36,61%, masuk kategori rendah (Rahmawati & Indrarini, 2023). Sementara itu, di Pondok Pesantren Rabithah Ma'ahid Islamiy Nahdlatul Ulama (RMI NU) DKI Jakarta, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah santri sebesar 34%, juga tergolong rendah (Hidayah, 2023). Ketiga temuan ini menegaskan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan santri agar mampu mengelola keuangan secara bijak sesuai prinsip Islam.

Perilaku literasi keuangan syariah santri dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Social Learning Theory*. TPB, yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), menekankan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh *attitude*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks ini, religiositas mencerminkan sikap positif santri terhadap keuangan Islami, pengaruh sosial berasal dari orang tua, guru, dan teman sebaya, sedangkan kontrol perilaku dipengaruhi oleh faktor sosiodemografi dan kurikulum pesantren (Mahdzan et al., 2017; Imari et al., 2023; Hasan et al., 2018; Khan et al., 2017; Rapi & Kassim, 2023). Literasi keuangan syariah menjadi bentuk nyata dari

perilaku tersebut. Sementara itu, *Social Learning Theory* menjelaskan bahwa perilaku terbentuk melalui observasi dan peniruan terhadap figur penting seperti orang tua, ustadz, dan teman sebaya, serta dipengaruhi oleh pendidikan keuangan dalam keluarga yang berperan sebagai moderasi dalam membentuk kebiasaan finansial santri sesuai prinsip Islam (Bandura, 1977; Ormrod, 2023; Ali et al., 2020; Zulnaldi & Zakaria, 2021; Jorgensen & Savla, 2010; Gudmunson & Danes, 2011; Pahlevan et al., 2020).

Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter serta nilai kehidupan, termasuk literasi keuangan. Sosialisasi keuangan sejak dini dalam keluarga terbukti meningkatkan kemampuan anak dalam mengelola uang (Zhu, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam edukasi keuangan berdampak positif terhadap literasi keuangan anak, termasuk dalam konteks syariah (Jorgensen & Savla, 2010; Kagotho et al., 2017; Pahlevan et al., 2020). Pendidikan keuangan keluarga yang efektif mampu membentuk kebiasaan finansial yang sehat, menanamkan sikap hemat, dan mendorong pengambilan keputusan ekonomi yang etis sesuai nilai-nilai Islam.

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan guna memperkuat literasi keuangan syariah santri sebagai strategi membentuk generasi muslim yang religius dan cakap finansial. Rendahnya literasi di wilayah Priangan Timur, pusat pesantren terbesar di Indonesia, menjadi ancaman di tengah maraknya pinjaman daring berbunga (OJK, 2024; BBC Indonesia, 2022). Literasi yang baik mendorong kemandirian finansial, memperkuat ekonomi pesantren, dan memperluas inklusi keuangan syariah nasional. Penelitian ini mengkaji pengaruh sosiodemografi, religiositas, pengaruh sosial, dan kurikulum terhadap literasi santri, serta menempatkan pendidikan keuangan keluarga sebagai moderasi penting dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan finansial Islami (Gudmunson & Danes, 2011; Hassan et al., 2018; Khan et al., 2017).

Penelitian ini menawarkan kebaruan utama dengan mengkaji literasi keuangan syariah santri di Priangan Timur, Jawa Barat wilayah dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia (Kemenag, 2024) sekaligus provinsi dengan nilai utang pinjaman daring tertinggi secara nasional, Rp19,38 triliun atau 26% dari total nasional (OJK, 2024). Berbeda dari studi sebelumnya (Farida, 2022;

Rahmawati & Indrarini, 2023; Hidayah, 2023) yang umumnya hanya menyoroti aspek umum atau sedikit variabel, riset ini mengintegrasikan empat variabel utama sosiodemografi, religiositas, pengaruh sosial, dan kurikulum pesantren dengan pendidikan keuangan keluarga sebagai variabel moderasi, serta mengaitkannya dengan fenomena meningkatnya pinjaman daring di kalangan Gen Z, kelompok usia yang juga mencakup mayoritas santri. Survei *IDN Times Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025* mencatat 58% Gen Z menggunakan pinjaman daring untuk gaya hidup dan hiburan, sedangkan Milenial lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangga (IDNTimes, 2025). Pendekatan berbasis *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) dan *Social Learning Theory* (Bandura, 1977) secara terpadu ini jarang diterapkan, khususnya pada konteks social dan ekonomi kompleks seperti wilayah Priangan Timur. Kontribusi orisinal lainnya adalah menguji fenomena maraknya santri terjerat pinjaman daring berbunga (Kompas, 2022) dan membantah asumsi bahwa lingkungan pesantren otomatis membekali santri dengan literasi keuangan syariah memadai, sebagaimana dibuktikan oleh temuan empiris (Andrean & Ratnawati, 2022), sehingga hasilnya diharapkan memberi kontribusi teoretis dan rekomendasi praktis bagi penguatan kurikulum, kebijakan pendidikan keuangan keluarga, dan pemberdayaan santri sebagai agen ketahanan ekonomi umat.

Atas hal tersebut dan dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian relevan yang sesuai dengan judul yang diusulkan “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah Santri: Peran Pendidikan Keuangan Keluarga sebagai Variabel Moderasi**”, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai literasi keuangan berbasis syariah, khususnya di kalangan santri sebagai kelompok strategis dalam pendidikan Islam. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi penguatan peran pesantren dan keluarga dalam membentuk perilaku keuangan santri yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Literasi keuangan masih rendah secara global di angka 33%, proporsi presentase literasi keuangan ini di dominasi oleh laki-laki 35% dan perempuan 30% (FinLit Global S&P, 2025).
2. Literasi keuangan Indonesia tahun 2025 hanya 66,46%, tertinggal dari Malaysia, Thailand (67,00%), dan jauh di bawah Singapura (71,00%) (OJK, 2025; Asia-Pacific Financial Literacy Index, 2025).
3. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun literasi keuangan syariah masih rendah, yaitu 43,42%, dengan inklusi keuangan syariah hanya 13,41% (OJK, 2025).
4. Literasi keuangan syariah di Jawa Barat masih rendah, yaitu 18,06%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 37,43% (OJK, 2025).
5. Terdapat kesenjangan literasi keuangan syariah antara kota (70,89%) dan desa (59,60%) (OJK, 2025).
6. Rendahnya literasi keuangan membuat banyak orang terjebak utang, termasuk pinjaman berbunga tinggi, hingga total pinjaman daring di Indonesia mencapai Rp74,48 triliun (OJK, 2024).
7. Per September 2024, Jawa Barat mencatat utang pinjaman daring tertinggi sebesar Rp19,38 triliun (26% nasional). Mayoritas peminjam berusia 19-34 tahun, menyumbang Rp27,1 triliun atau 54,06% dari total nasional (OJK, 2024).
8. Sebanyak 58% Gen Z mengambil pinjaman daring untuk memenuhi gaya hidup dan hiburan. Sedangkan, mayoritas Milenial (54%) justru melakukan pinjaman daring untuk keperluan rumah tangga (*IDNTimes*, 2025)
9. Ratusan santri menjadi korban penipuan modus baru dengan menjanjikan keuntungan 10% dan berujung berutang pinjaman daring (Kompas, 2022).
10. Pada 2024, terdapat 42.435 pesantren berizin dengan 4,9 juta santri, terbanyak di Jawa Barat (13.005). Potensi ini besar untuk mendorong industri keuangan (Kemenag, 2024).

11. Priangan Timur mendominasi jumlah pesantren di Jawa Barat, dengan Tasikmalaya terbanyak (2.862 pesantren), mencerminkan kuatnya tradisi Islam dan peran sebagai 'Kota Santri' (Kemenag, 2024).
12. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan santri di pondok pesantren masih rendah (Andrean & Ratnawati, 2022); (Farida, 2022); (Rahmawati & Indrarini, 2023); (Hidayah, 2023).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun beberapa pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat literasi keuangan syariah santri, karakteristik sosiodemografi, tingkat religiositas, pengaruh sosial, kurikulum pesantren, dan tingkat pendidikan keuangan keluarga di pondok pesantren wilayah Priangan Timur, Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik sosiodemografi terhadap literasi keuangan syariah santri?
3. Bagaimana pengaruh religiositas terhadap literasi keuangan syariah santri?
4. Bagaimana pengaruh pengaruh sosial terhadap literasi keuangan syariah santri?
5. Bagaimana pengaruh kurikulum pesantren terhadap literasi keuangan syariah santri?
6. Bagaimana pengaruh pendidikan keuangan keluarga terhadap literasi keuangan syariah santri?
7. Apakah pendidikan keuangan keluarga memoderasi pengaruh karakteristik sosiodemografi terhadap literasi keuangan syariah santri?
8. Apakah pendidikan keuangan keluarga memoderasi pengaruh religiositas terhadap literasi keuangan syariah santri?
9. Apakah pendidikan keuangan keluarga memoderasi pengaruh pengaruh sosial terhadap literasi keuangan syariah santri?
10. Apakah pendidikan keuangan keluarga memoderasi pengaruh kurikulum pesantren terhadap literasi keuangan syariah santri?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang tingkat literasi keuangan syariah santri, karakteristik sosiodemografi, tingkat religiositas, pengaruh sosial, kurikulum pesantren, dan pendidikan keuangan keluarga di pondok pesantren wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini dirancang untuk mengkaji pengaruh karakteristik sosiodemografi, religiositas, pengaruh sosial, dan kurikulum pendidikan terhadap literasi keuangan syariah santri, serta menganalisis peran pendidikan keuangan keluarga sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan literasi keuangan syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Melalui penelitian ini, diharapkan terdapat kontribusi secara akademis serta memperkaya literatur terkait literasi keuangan syariah di kalangan santri dengan mempertimbangkan pengaruh karakteristik sosiodemografi, religiositas, pengaruh sosial, dan kurikulum pesantren, serta peran pendidikan keuangan keluarga sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian relevan di masa mendatang, baik untuk memperluas cakupan variabel yang digunakan, menguji model moderasi dalam konteks berbeda, maupun melakukan studi ulang di wilayah pesantren lain guna meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu pihak pondok pesantren untuk meningkatkan peran pendidikan dan pengasuhan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk santri yang tidak hanya religius secara spiritual, tetapi juga cakap dalam mengelola keuangan secara syariah dan bertanggung jawab. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat membantu keluarga, khususnya orang tua santri, agar lebih aktif dalam memberikan pendidikan keuangan sejak dini, sehingga terbentuk pola pikir dan perilaku finansial yang sehat dan sesuai syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

kesadaran kepada santri mengenai pentingnya literasi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari, agar ke depan mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, menghindari praktik *riba* seperti pinjaman daring berbunga, serta menjadi generasi muslim yang mandiri dan sadar terhadap prinsip keuangan yang halal, adil, dan berkelanjutan.